



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDIH MULYADI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG
3. NHK : 276722

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.890.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/42 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/90 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 6292 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
5. Tanah Seluas 1118 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 1032 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah Seluas 2150 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **164.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



12.000.000

4. LAINNYA, SEPEDA MOUNTAIN BIKE MOUNTAIN BIKE Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.0005. MOTOR, HONDA BEAT BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE HBRT
BUNDLING Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **64.950.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **589.637.207****F. HARTA LAINNYA** Rp. **55.000.000****Sub Total** Rp. **2.764.087.207****III. HUTANG** Rp. **76.513.686****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.687.573.521**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.